

LSM dan Teori Permainan Bola

Sumber Buku Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, KOMPAS, 2004, halaman : 85 – 92.
Sumber Tulisan, KOMPAS, 9 Agustus 1998.

Oleh : Tri Agung Kristanto

SEBELUM akhirnya tuntutan reformasi ditanggapi serius, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebenarnya sudah seringkali menyuarakan berbagai kritik kepada pemerintah Orde Baru. Suara mereka yang begitu nyaring, kadang dianggap angin lalu, malah sering dianggap sebagai gangguan oleh pemerintah. Harus diakui, sebagian reformasi merupakan jasa dari kekonsistenan LSM menyuarakan suara rakyat banyak.

Jauh sebelum gerakan reformasi bergulir dan berhasil membuat Soeharto lengser dari jabatan presiden setelah berkuasa 32 tahun, Budayawan YB Mangunwijaya pernah mengingatkan, agar (pemerintah) jangan melawan kodrat muda. Walau singa itu kuat, raja hutan dan tidak tertandingi (tampaknya), namun ternyata kancil bisa mengalahkan pula.

“Jangan melawan kodrat muda. Di seluruh dunia, LSM (lembaga swadaya masyarakat), sering disebut organisasi non pemerintah (ornop), selalu idealistik romantis. Daud melawan Goliat, dan kancil melawan singa. Tidak ada nabi besar yang tidak idealistik romantis. Tidak ada pembaharu dunia yang tidak idealistik romantis,” ungkapnya dalam di *Kompas* 2 Januari 1992.

Proklamator Bung Karno pun sering menyebutkan kaum pemuda sebagai “progresif revolusioner”. Dan, se usai mengatakan begitu Bung Karno akan mengingatkan lagi “revolusi belum selesai”. Ini aba-aba supaya kaum muda siap mengambil alih kepemimpinan.

Di Indonesia hampir semua LSM berciri idealistik romantis. Ini yang membuat mereka menjadi kritis, korektif kepada pemerintah dan berupaya sekuat tenaga memberdayakan masyarakat. Ada yang dengan cara memberikan bantuan dan bimbingan, sehingga LSM ini sering dimasukkan kategori LSM karitatif atau *developmentalist*. Atau, LSM yang mendampingi masyarakat untuk merebut haknya, memberdayakan warga sehingga kritis. Mereka acapkali disebut sebagai LSM kelompok advokasi atau transformatif.

Jauh sebelum gerakan reformasi bergulir yang ditandai dengan usulan pemerintah agar mengganti misalnya, lima paket undang-undang politik, aktivis LSM sudah menyerukan itu. Pendukung Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Partai Rakyat

Demokratik (PRD), pengacara beragam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga sudah meminta pencabutan UU itu lima tahun lalu. Tetapi, mereka (waktu itu) harus ditangkap, diadili, dan dihukum. Padahal, sebenarnya mereka inilah yang disebut Soekarno kaum progresif revolusioner yang harus melanjutkan revolusi yang belum usai. Revolusi dalam arti mengubah tatanan menjadi lebih baik, demokratis, dan berkeadilan sosial.

DUKUNGAN terhadap LSM/ornop sewaktu mereka menyerukan reformasi pada awalnya tidak terlalu banyak. Bahkan, tidak sedikit yang mencibirkan bibir, serta menganggap mereka *nggege mongso* (mendahului waktu). Itu karena kuatnya rezim pada waktu itu. Selain, karena yang sering meneriakkan perubahan, terutama melalui parlemen jalanan, adalah anak-anak muda yang dianggap kurang berpengalaman.

Ketika perubahan terjadi, baru masyarakat sadar ternyata seruan perubahan itu benar. Lalu, masyarakat pun bertanya-nyata mengapa LSM bisa bersikap kritis? Mengapa aktivis LSM berani menyuarakan sebuah perubahan pada saat yang (kala itu) belum tepat?

Sebenarnya, jelas Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Pius Lustrilanang, tidak seluruh aktivitas LSM/ornop berani bersuara lantang perubahan, karena banyaknya ragam LSM. Tetapi mereka yang bergerak di bidang LSM advokasi atau transformasi sejak awal menyadari aktivitasnya akan terus berbenturan dengan kekuasaan.

“Benturan yang membuat kami berani menyerukan perubahan. Risiko dari seruan itu, paling patah tulang. Namun yang membuat kami berani terus, karena adanya dukungan moral dari masyarakat. Masyarakat yang men-support,” ujar Desmond Junaidi Mahesa, aktivis korban penculikan dan penghilangan aktivis.

Tokoh ornop MM Billah dan Asmara Nababan mengutarakan, aktivitas LSM sebenarnya sama dengan masyarakat lainnya yang bersikap kritis. Sikap kritis itu muncul, didorong dinamika masyarakat yang tinggi, arus teknologi informasi yang pesat, dan dari berbagai diskusi yang kritis mengenai kekuasaan (pemerintah). Barangkali yang membedakan, aktivis LSM “siap mati” menyuarakan keyakinannya itu.

Billah menjelaskan, gerakan modernisasi selalu melahirkan suatu gerakan tandingan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang merupakan gerakan modernisasi pasti akan melahirkan tandingan, yakni gerakan masyarakat yang kritis. Gerakan itu bisa berwujud LSM atau partai politik (oposisi).

“Untuk di Indonesia, tekanan politik itu sangat besar, sehingga ruang untuk menyuarakan kebebasan itu terbatas. Partai politik tidak bisa berfungsi, sebab

dikooptasi, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya kepada rezim. Ditambah dengan keresahan di kalangan LSM, makin mendorong ada perlawanan. Ini yang menjadikan LSM kritis,” jelas Direktur CPSM (Community for Participatory Sosial Management) itu.

Ditambahkan, sebenarnya yang berperan besar mendorong perubahan dan menyuarakan tuntutan masyarakat bukan LSM semata. Pers berperan amat besar.

Peran media massa dalam mendukung kekritisn aktivitas ornop/LSM sudah disadari lama. Fungsionaris Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu LSM besar di Indonesia, Emmy Hafild suatu waktu pernah menyebutkan, hubungan LSM dengan pers mutlak yang harus dilakukan serta dijaga, karena terbukti tujuan perjuangan LSM akan lebih cepat dicapai bila dibantu pers. Pers juga dapat menjadi salah satu sumber untuk mendapat informasi bagi LSM guna mengetahui isu dan tempat yang membutuhkan bantuan mereka.

Meski demikian, aktivis LSM Rahardjo Waluyo Jati mengingatkan, kemampuan dan sikap kritis yang tertanam sejak awal dari seorang aktivis ornop itulah yang menentukan LSM tempatnya bernaung akan kritis atau sekedar ikut arus perubahan. Sikap kritis aktivis LSM, yang bila dikutip media massa menjadi berita yang menguntungkan LSM itu maupun pers sendiri, dapat muncul dari diskusi terencana maupun dari bangku kuliah.

“Saya kebetulan mendapatkannya. Dari pendidikan filsafat, saya mendapatkan kerangka berfikir untuk melihat setiap persoalan masyarakat dari sisi yang kritis. Ditambah dengan benturan dan pengalaman selama ini membuat saya menjadi begini,” tandas mahasiswa Fakultas Filsafat UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta itu.

Ia menambahkan, lingkungan turun menjaga kekritisn aktivis LSM. Sebagai anak perantau di Yogyakarta, dia merasakan Kota Pelajar itu sangat egaliter, jurang si-kaya dan si-miskin tidak lebar. Kalau pun ada, masih ada perasaan yang menyatukan mereka. Ini membuat Jati merasa terus terasah untuk kritis dan peduli kepada wong cilik. Dan, untuk membuktikan kebenaran “teorinya”, ia menyebut sejumlah aktivis ornop kritis pernah “bersentuhan” dengan Yogyakarta, misalnya Budiman Sudjatmiko (pernah bersekolah dan kuliah di Yogyakarta) atau Andi Arief yang alumnus Fisipol UGM.

Tetapi sebenarnya, uraian Asmara Nababan yang juga pengurus INFID (Internasional NGO’s Forum for Indonesia Development), yang paling menentukan kekritisn seorang aktivis LSM, adalah cara hidup aktivis LSM/ornop itu sendiri. “Kehidupan di LSM itu sangat liberal, populis dan didorong untuk terus kritis. Bukan berarti tidak ada korupsi dan oportuniste, tetapi itu tak sempat berkembang, karena ada kontrolnya dari anggota LSM/ornop itu sendiri,” jelas anggota Komnas HAM itu.

Barangkali karena sudah biasa kritis ke dalam, ke LSM tempatnya bernaung, aktivis LSM juga kritis ke luar (pemerintah). Karena biasa berteriak di dalam, mereka menjadi berani berteriak mendorong sebuah perubahan tatanan pemerintahan pula.

REFORMASI yang didorong mahasiswa Indonesia, aktivis LSM, serta media massa di Indonesia memang belum paripurna. Ada secercah harapan kebebasan rakyat menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam setiap proses politik, sehingga pemerintahan yang bersih bisa terwujud akan datang juga. Walaupun, terlihat dengan lahirnya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, harapan itu masih akan panjang dan lama terwujudnya.

Billah dan Nababan berpendapat reformasi akan melahirkan sebuah Indonesia baru yang lebih demokratis. Artinya, perjuangan LSM selama ini untuk menegakkan demokrasi serta memberdayakan masyarakat akan tercapai. Tetapi bukan berarti peran LSM, yang di Indonesia saat ini jumlahnya lebih dari 7.000 kelompok, akan hilang.

Menurut Nababan, basis demokrasi adalah *civil society* dan bukan *political society*. Gerakan reformasi yang diharapkan memberikan ruang gerak untuk LSM/ornop. Mereka dapat menjadi mitra pemerintah makin memberdayakan rakyat atau menjadi kontrol atas berbagai kebijakan pemerintah.

“Di negara demokratis apapun, seperti di Amerika Serikat, ornop tetap mempunyai ruang untuk berkiprah. LSM/ornop tetap bisa berperan memberikan pemahaman konstruksi perpikir dalam kerangka masyarakat yang semakin demokratis. Peran LSM itu, adalah memperkuat masyarakat madani sehingga masyarakat tetap mempunyai peran di dalam proses politik. Karena pemerintah, sektor publik, dan parlemen tetap harus diawasi masyarakat,” tuturnya.

Agak berbeda, Pius Lustrilanang menyatakan, dengan adanya angin reformasi akan mendorong sejumlah LSM/ornop berubah menjadi partai politik. Sebagai Sekjen Aldera, ia akan mendorong ornop ini menjadi parpol, sehingga bisa lebih mengatikalasikan kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingannya. Meski demikian, tidak berarti aksi yang sering dilakukan Aldera, termasuk masyarakat mendukungnya terus ditinggalkan.

Sementara Billah menyatakan, reformasi tidak perlu mengubah LSM menjadi parpol. Tetapi LSM/ornop dapat menjadi kelompok penekan untuk mengangkat isu tertentu dalam masyarakat, misal isu lingkungan hidup, kemiskinan, atau pelanggaran HAM. Isu itu lalu dilemparkan kepada parpol yang ada untuk diperjuangkan di parlemen.

“Kalau negara sudah demokratis, LSM bisa berperan sebagai kelompok penekan. Ini membutuhkan kreativitas aktivis yang dapat mencari isu dilemparkan kepada parpol. Seperti permainan sepak bola, LSM bertugas mengumpan bola dan parpol yang menggolkan di DPR. Selama ini LSM ‘kan bermain sendiri, karena parpol tidak pernah bisa mengungkap umpan itu,” katanya.

Menyinggung kemungkinan LSM menjadi parpol, Billah menyebutkan, itu dapat saja terjadi. “Saya tidak tahu LSM mana yang akan menjadi parpol. Tetapi mungkin dasar pemikirannya, adalah pemilu berlangsung setahun lagi. Dengan demikian, parpol yang baru belum siap. Pemenang pemilu pasti parpol lama, yang belepotan dengan dosa-dosa Orde Baru. Inilah yang mendorong kekuatan reformasi, termasuk LSM untuk menjadi parpol tersendiri,” analisisnya.

Menyangkut peran LSM di masa depan, setelah negeri ini menjadi lebih demokratis, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid pernah mengatakan, kerja sama antara parpol dan LSM tidak dapat dengan mudah diwujudkan. Selain perundang-undangnya tak memungkinkan, pun ada kesan yang tertanam dalam diri parpol terhadap LSM, yakni ornop sering dianggap tidak memahami kompleksitas masalah, sehingga sulit diajak bekerja sama. Sedangkan kalangan LSM melihat parpol acapkali tidak menyentuh persoalan masyarakat. Perhatian parpol untuk masyarakat hanya untuk kepentingannya sendiri (Kompas 5/6/1991).

Dengan demikian, sekalipun reformasi berhasil merubah tatanan masyarakat, LSM/ornop sebagai sebuah kekuatan reformasi masih harus tetap bergerak mengisi celah-celah kehidupan yang ada. Seperti ditulis David C. Korten dalam *Getting to the 21st Century*, hidup di bumi ini bagai dalam wahana angkasa yang besar yang tidak punya sekoci. Kita makmur bersama atau musnah bersama. Agar tidak terjadi seperti itu, LSM sebagai kaum “romantik idealistik” masih harus bergerak, mencari sekoci penyelamat.